

SKRIPSI

TRI WAHYUDI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA



KK
Per 24/3 '98
Dik
2

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA BIDANG ILMU HUKUM



Pembimbing,

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

NIP. 130 809 069

Penyusun,

Tri Wahyudi


NIM. 039414037

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

Telah diuji pada tanggal : 9 Pebruari 1998.

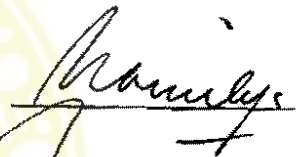
Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



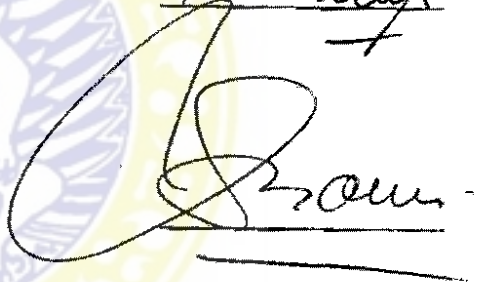
Handwritten signature of Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

2. Sekretaris : Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



Handwritten signature of Naniek Endang Wrediningsih, S.H.

3. Anggota : Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.



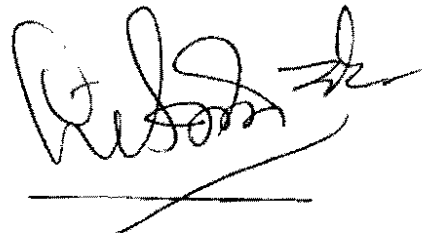
Handwritten signature of Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.

Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Handwritten signature of Sri Handajani, S.H., M.Hum.

Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Handwritten signature of Lisman Iskandar, S.H., M.S.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Dalam perjanjian franchise aspek hukumnya meliputi dua bidang hukum, yaitu: hukum perjanjian dan hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dari segi hukum perjanjian pada dasarnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian franchise, yaitu franchisor dan franchisee mendasarkan pada ketentuan BW, khususnya pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak para pihak. Namun ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Juni 1997 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, tentang: Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut selain untuk melindungi konsumen dan meningkatkan pengusaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang, juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya peningkatan pelaksanaan alih teknologi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997 menetapkan bahwa perjanjian franchise (Waralaba) harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan terhadap perjanjian tersebut berlaku hukum Indonesia. Sedangkan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran usaha waralaba,

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Keputusan Nomor: 259/MPP/KEP/7/1997, tentang: Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 1997 tersebut sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997.

- b. Perjanjian franchise (*Franchise Agreement*) yang disepakati oleh franchisor dan franchisee apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW maka akan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam *franchise agreement*, dimana setelah kesepakatan tersebut tercapai akan memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam *franchise agreement* memuat klausula-klausula yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dipenuhi oleh mereka.
- c. Perjanjian franchise yang telah disepakati oleh franchisor dan franchisee tidak akan tertutup kemungkinan timbulnya sengketa. Penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa oleh para pihak dicantumkan dalam klausula perjanjian. Dalam klausula perjanjian tersebut dicantumkan mengenai hukum negara mana yang diberlakukan, serta lembaga hukum mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa.

2. Saran.

- a. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih rinci lagi yang mengatur sistem usaha franchise (waralaba), meskipun Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997 Tentang: Waralaba, juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang: Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam peraturan tersebut diatas lebih mengutamakan pada sistem usaha waralaba lokal, padahal saat sekarang pertumbuhan sistem usaha waralaba yang melibatkan franchisor asing berkembang demikian pesat, belum nanti pada tahun 2003 di era perdagangan bebas tidak menutup kemungkinan masuknya franchisor asing lebih banyak dibanding sekarang. Franchisor asing yang akan mengadakan perjanjian franchise dengan franchisee nasional Indonesia tentunya juga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila franchisor asing tidak bisa (mau) menerima sistem dan aturan hukum Indonesia, apakah tidak menutup kemungkinan bagi franchisor asing enggan untuk mengadakan perjanjian franchise dengan franchisee lokal di Indonesia. Jadi sebaiknya Pemerintah meninjau dan merevisi lagi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut guna memberikan pengaturan yang proporsional baik kepada sistem usaha waralaba lokal maupun sistem usaha waralaba internasional.

- b. Dalam perjanjian franchise sebaiknya klausula yang dicantumkan memberikan keuntungan yang sama (kedudukan yang sejajar) bagi kedua belah pihak yaitu franchisor dan franchisee. Hal tersebut untuk menghindari adanya dominasi salah satu pihak dimana akan merugikan pihak yang lain. Sebagai contoh franchisor menetapkan persyaratan-persyaratan yang dianggap memberatkan franchisee dalam perjanjian franchise. Hal tersebut akan menyebabkan franchisee akan menderita kerugian serta dalam menjalankan usahanya tidak akan dapat berkembang dengan baik.
- c. Dalam klausula mengenai pilihan hukum dan pilihan lembaga yang menangani apabila terjadi sengketa sebaiknya ditentukan secara jelas oleh franchisor dan franchisee. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesulitan dalam penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Apabila para pihak telah mencantumkan pilihan hukum secara jelas maka lembaga yang menangani sengketa tersebut akan mengutamakan pilihan hukum sebagaimana tercantum dalam klausula perjanjian yang telah disepakati oleh franchisor dan franchisee.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997 tentang: Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor.259/MPP/KEP/7/1997 tentang: Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, menentukan bahwa perjanjian franchise yang dibuat oleh franchisor dan franchisee harus tunduk pada hukum Indonesia. Jadi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan tersebut telah membatasi mengenai pilihan hukum para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian franchise. Para pihak yang membuat perjanjian franchise di Indonesia atau salah satu pihak warganegara Indonesia mau tidak mau harus memilih dan menggunakan hukum atau lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengatur lebih rinci mengenai pilihan hukum dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian franchise.

